

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia melalui pemberdayaan UMKM yang direncanakan mulai tahun 2025 harus memastikan bahwa seluruh tahapan program mampu mengoptimalkan peran berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting agar program dapat memberikan efek pengganda yang signifikan bagi masyarakat. Anggaran sebesar 71 triliun rupiah yang dialokasikan untuk program MBG pada tahun 2025 melalui keterlibatan UMKM diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 4.510 triliun rupiah. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menyerap sekitar 0,82 juta tenaga kerja (Indef, 2024). Melalui Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya (Suardi & Purmadani, 2025).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak hanya diukur dari ketersediaan makanan bergizi. Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, yaitu peningkatan partisipasi, keterampilan, dan kemandirian ekonomi (Suardi & Purmadani, 2025). Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran. Oleh karena itu, reformasi ketenagakerjaan sedang dilaksanakan oleh semua pemerintah, termasuk Indonesia. Untuk menurunkan pengangguran, pemerintah bekerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk menyerap tenaga kerja yang ada dan menciptakan lapangan kerja

baru. (Muslihatinningsih et al., 2020). Berikut angka pengangguran di Kabupaten Jombang :

Tabel 1.1 Angka TPT Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024	Persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,48	7,09	5,47	4,66	3,75	-0,91
Laki-laki	8,08	7,7	3,79	4,42	4,48	0,06
perempuan	6,61	6,18	8,18	5,01	2,67	-2.34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,23	70,69	66,65	71,91	71,88	-0,02
Laki-laki	84,53	85,71	83,28	86,04	85,48	-0,56
Perempuan	56,28	56,02	50,42	57,68	58,20	0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang menurun menjadi 3,75 persen dari 4,66 persen pada tahun 2023. Meski turun, jumlah pengangguran masih cukup besar yaitu 28.738 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2024), sehingga menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tetap signifikan. Selain itu, berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Jombang 2025–2029, TPT diproyeksikan kembali meningkat dalam lima tahun ke depan. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa penurunan TPT pada 2024 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang stabil. Berikut data proyeksi TPT :

Tabel 1.2 Proyeksi TPT Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

No	Jenis kelamin	2025	2026	2027	2028	2029
1	Laki-laki	34.217	35.477	36.736	37.996	39.256
2	Perempuan	9.447	9.17	8.894	8.617	8.34
Jumlah		43.664	44.647	45.63	46.613	47.596

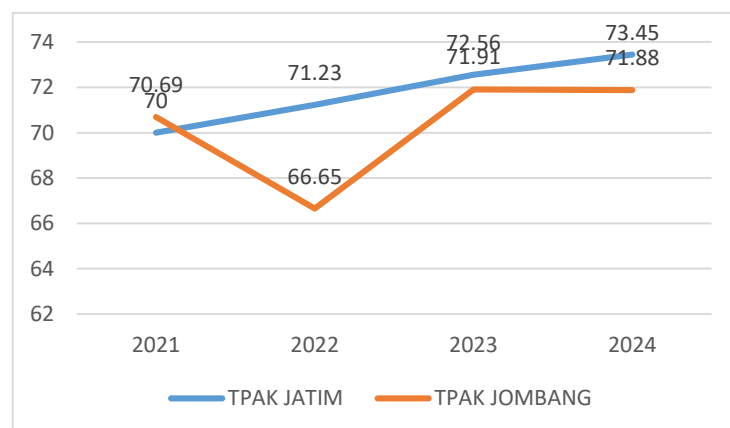
Sumber : Hasil Pengolahan (Proyeksi) Berbasis Data BPS Sakernas, Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Jombang 2024

Rencana tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Jombang 2025–2029, hasil proyeksinya menunjukkan bahwa jumlah penganggur terbuka di Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 tercatat sekitar 43.664 orang, meningkat menjadi 47.596 orang pada 2029 (Dinas tenaga kerja Kabupaten Jombang, 2024). Fenomena pengangguran akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di semua tempat, khususnya Kabupaten Jombang. Sumber Radar Jombang mengklaim hal itu. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang terbukti masih tinggi meskipun lapangan kerja di daerah tersebut masih rendah. Hingga akhir tahun 2023, jumlah penduduk Jombang yang tercatat sebagai pengangguran sebanyak 35.334 orang, dengan rincian 9.552 orang lulusan SD, 7.918 orang lulusan SMP, 9.084 orang lulusan SMK, 6.020 orang lulusan SMA, dan mayoritas 2.790 orang lulusan perguruan tinggi. Pada tahun 2024, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang sebesar 3,75 % atau setara 28.738 jiwa Ketimpangan jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia semakin memperparah permasalahan pengangguran di Kabupaten Jombang (Kurniawan, 2025).

Peningkatan TPAK ini berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berarti penurunan TPAK dapat meningkatkan pengangguran terbuka. Penurunan TPAK mengindikasikan berkurangnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan, yang dapat meningkatkan

tingkat pengangguran terbuka (Lestari & Nilasari, 2025). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, mereka yang bekerja tetapi sementara tidak aktif bekerja, dan mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Intinya, angkatan kerja Pekerjaan dibagi menjadi dua kategori, mereka yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang secara langsung menghasilkan barang atau jasa selama seminggu adalah mereka yang sedang bekerja mendapatkan setidaknya satu jam setiap minggu (Mulyadi Subri, 2017).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) apabila terus meningkat namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja, maka kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja akan melemah. Kondisi ini berpotensi menambah jumlah pengangguran dan menimbulkan tekanan baru bagi perekonomian daerah, karena tingginya jumlah pencari kerja tidak diikuti oleh ketersediaan pekerjaan yang memadai (Faizah, u. n., & Woyanti, 2023). Berikut ini adalah data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kabupaten Jombang dan rata-rata di Jawa Timur tahun 2021-2024 :



Gambar 1. 1 TPAK Kabupaten Jombang Dan Jawa Timur Tahun 2021-2024

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jombang tahun 2021-2024. Grafik menggambarkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2022 sebesar 66,65% mengalami penurunan menurut disnaker Kabupaten Jombang hal ini disebabkan menurunnya jumlah angkatan kerja . sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 71,91%, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 71,88% angka ini menunjukan penurunan TPAK di kabupaten jombang pada tahun 2024. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handani dan suhianto ditemukan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin rendah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di suatu daerah, maka tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi masalah karena mencerminkan berkurangnya keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya mempersempit peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Handani & Suhianto, 2025).

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan tetapi bersedia bekerja jika ada kesempatan (Badan Pusat Statistik). Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang juga diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adanya indikasi fenomena sebagai Seorang discourage-worker, dalam ilmu ekonomi, adalah penduduk yang berada pada usia kerja namun yang tidak aktif mencari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan setelah pengangguran jangka panjang. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang telah menyerah mencari atau sudah tidak berhasil dalam mencari pekerjaan, maka istilah "putus asa" seringkali digunakan (Adriani, 2013).

Discourage-worker tidak dianggap sebagai bagian terpenting dari tenaga kerja dan karenanya, angka *discourage-worker* tidak dihitung dalam tingkat pengangguran yang paling resmi, yang mempengaruhi penampilan dan interpretasi statistik pengangguran. Meskipun beberapa negara menawarkan langkah-langkah alternatif dari tingkat pengangguran, keberadaan *discourage-worker* dapat disimpulkan dari rasio pekerja dan populasi yang rendah (Agloba, 2005). Dalam beberapa kasus, keyakinan mereka mungkin berasal dari berbagai faktor termasuk kurangnya pekerjaan di wilayah atau bidang pekerjaan mereka, diskriminasi karena alasan seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan cacat, kurangnya keterampilan yang diperlukan, pelatihan, atau pengalaman, atau, penyakit kronis atau cacat (Adriani, 2013).

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan stimulus terhadap ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja di sektor produksi makanan dan distribusi bahan pangan. Program makan bergizi gratis (MBG) memberikan peluang finansial bagi produsen, petani, dan nelayan lokal. UMKM juga dapat berpartisipasi dalam pemasok bahan pangan dan menyediakannya langsung kepada penerima manfaat program. Sistem logistik dan transportasi yang efektif diperlukan untuk Program makan bergizi gratis (MBG), yang niscaya akan menciptakan lapangan kerja baru dari pedesaan hingga perkotaan (Suardi & Purmadani, 2025).

Menurut (Trisno Aji, 2025) mengklaim bahwa tantangan utama program ini adalah keterbatasan dana dan efisiensi pelaksanaan. Pemerintah telah menyediakan Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, dan dalam proyeksi kebutuhan total dana sebesar Rp298,4 triliun menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat pada 2029 (Trisno Aji, 2025).

Dalam laporan indef mengklaim bahwa proyek MBG memberikan efek perekonomian nasional yang signifikan. Aji mengklaim bahwa setiap 1000 rupiah yang dikeluarkan dalam program MBG memberikan manfaat ekonomi hingga Rp63.500 dan memobilisir PDB hingga Rp4.510 triliun 34,2% dari PDB konstan tahun 2025 melalui pendanaan UMKM dan mitra transportasi daring.

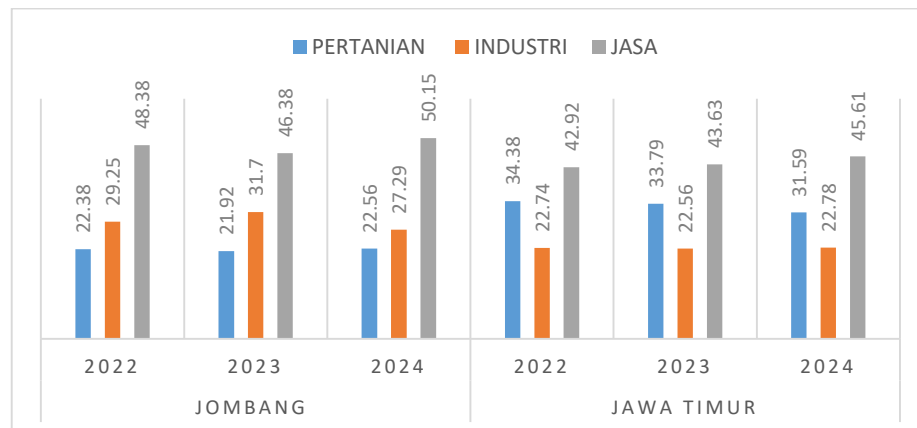
Makan Bergizi Gratis membuktikan hasil uji coba di 10 kota/kabupaten meningkatkan rata-rata tiga new job seorang pekerja baru untuk UMKM dan peningkatan pendapatan bersih 33,68% bagi pelaku yang terlibat (Indef, 2024). Dari sisi implementasi, pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek teknis dan kelembagaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana utama, Menurut (Febryanti *et al.*, 2025) banyak SPPG di daerah yang belum memiliki regulasi tertulis, tata kelola yang baku, dan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan makanan, dapur higienis, serta sarana distribusi yang memadai. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan variasi menu bergizi sulit diwujudkan secara konsisten, sehingga komposisi makanan sering berubah sesuai dana yang tersedia.

Penelitian (Febryanti *et al.*, 2025) menemukan bahwa koordinasi antara sekolah dan pihak SPPG masih dilakukan secara informal melalui media komunikasi seperti WhatsApp, tanpa dokumen resmi, yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam jumlah, waktu, dan kualitas makanan yang dikirimkan. (Herdiana, 2025) juga menekankan bahwa belum adanya pedoman teknis nasional tentang pengelolaan SPPG, standar gizi, dan mekanisme distribusi mengakibatkan pelaksanaan program berbeda-beda antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas manajerial dan operasional Dapur SPPG masih

menjadi titik lemah utama dalam keberhasilan MBG di tingkat sekolah (Indef, 2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak justru diwarnai insiden keracunan massal di beberapa daerah seperti Bandung dan Tasikmalaya pada April 2025. Kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, karena mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam rantai pasok makanan, pelatihan personel, dan regulasi keamanan pangan. Kegagalan dalam menjamin standar keamanan pangan ini tidak hanya mengancam tujuan utama program, tetapi juga menunjukkan perlunya pertanggungjawaban yang transparan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyedia bahan baku, pengelola dapur, dan lembaga pengawasan yang berwenang. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan langkah antisipatif melalui pengawasan mutu bahan pangan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola dapur agar insiden serupa tidak terjadi di wilayahnya, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian pratiwi 2025 bahwa pelaksanaan MBG memerlukan jaminan keamanan pangan dan tata kelola yang akuntabel di seluruh tingkatan pelaksana (Pratiwi, 2025).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang tahun 2024, menampilkan data distribusi penduduk bekerja masih didominasi oleh sektor jasa sebesar 50,15 persen, diikuti sektor industri 27,29 persen dan pertanian 22,56 persen. Namun, sektor industri justru menunjukkan penurunan jumlah pekerja hingga 27,86 ribu orang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor jasa memiliki potensi paling besar dalam menyerap tenaga kerja (BPS Jombang, 2024). Berikut Keadaan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dan Jawa Timur :



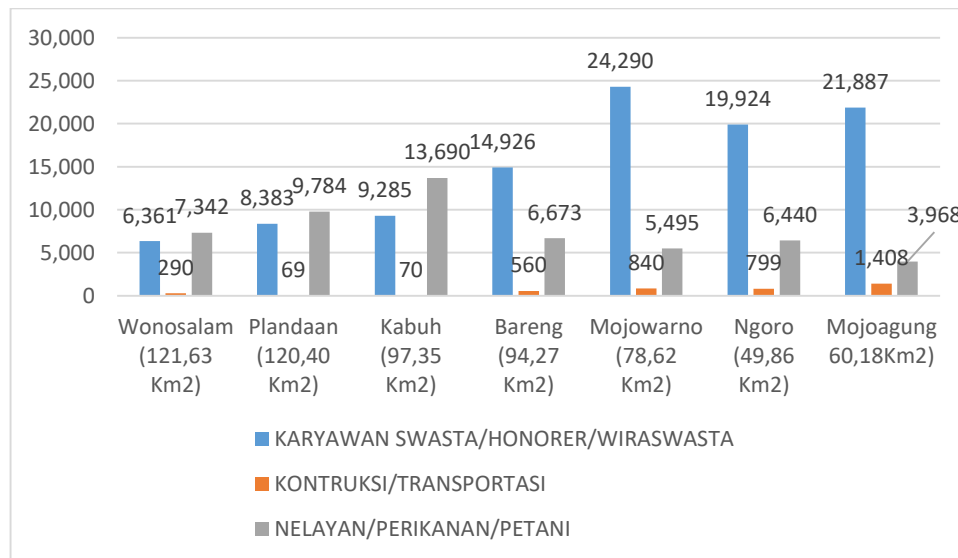
Gambar 1. 2 Keadaan Tenaga Kerja Jawa Timur Tahun 2022-2024

Sumber : BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Jombang Tahun 2022-2023 (diolah)

Gambar 1.2 tersebut sektor jasa sangat banyak menyerap tenaga kerja, dalam 3 tahun terakhir baik Kabupaten Jombang maupun Provinsi Jawa Timur memperlihatkan peningkatan pada sektor jasa. Hal ini berhubungan dengan Pelaksanaan MBG di tingkat daerah dilakukan melalui mekanisme dapur pelayanan yang bekerja sama dengan berbagai pelaku ekonomi lokal, terutama di sektor jasa pangan dan pengelolaan logistik. Dengan demikian, implementasi MBG menjadi contoh konkret kolaborasi antara negara dan pelaku jasa masyarakat (Prasetyo, 2025).

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang (2024) melaporkan bahwa banyak lulusan pendidikan menengah dan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dapat diterima karena sebagian besar pencari kerja tidak ingin bepergian jauh dari rumah, tempat tinggal dan keluarga, sehingga tidak mungkin mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kesukaannya. Selain itu, modernisasi di sektor pertanian dan pergeseran struktur ekonomi mengakibatkan penurunan pada permintaan tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran dalam jangka panjang (Kurniawan, 2025). Sektor jasa di Kecamatan Mojowarno juga perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan

ekonomi daerah, Sektor jasa karyawan swasta/honorir/wiraswasta di Kecamatan Mojowarno mencapai 24.290 orang, menjadikannya sektor dengan jumlah pekerja terbesar setelah pertanian Berikut Keadaan tenaga kerja kecamatan mojowarno dibandingkan dengan Kecamatan lain:



Gambar 1. 3 Keadaan Tenaga Kerja Kecamatan Mojowarno 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (diolah).

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa penduduk kecamatan mojowarno banyak terserap pada sektor jasa di bandingkan dengan Kecamatan lain. Kecamatan Mojowarno memiliki penduduk sebanyak 100.761 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51.380, sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu 49.381 dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai karyawan atau pegawai swasta Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2025 dalam (Salam, 2025).

Kecamatan Mojowarno dalam pelaksanaan program Dapur MBG juga sudah mulai berjalan dan melibatkan masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha jasa. Hal ini berhubungan dengan penelitian prasetyo yang menyebutkan Pelaksanaan MBG di tingkat daerah dilakukan melalui mekanisme dapur

pelayanan yang bekerja sama dengan berbagai pelaku ekonomi lokal, terutama di sektor jasa pangan dan pengelolaan logistik, dengan demikian, implementasi MBG menjadi contoh konkret kolaborasi antara negara dan pelaku jasa masyarakat (Prasetyo, 2025).

Sektor jasa di Kecamatan Mojowarno merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja, namun sebagian besar pekerjanya masih berpendidikan rendah dan bekerja secara informal. Berdasarkan data Mojowarno Dalam Angka 2024, tingkat pendidikan penduduk didominasi oleh lulusan SD sebesar 24 persen, disusul lulusan SMP 21,1%, dan lulusan SMA 21,8 %, sementara lulusan perguruan tinggi hanya 4,2 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa besar, kualitas sumber daya manusia yang mengisinya masih terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat.

Salah satu dapur SPPG di Kecamatan Mojowarno mampu menyalurkan porsi MBG sejumlah 3.500 porsi dikutip dari SUARAGONG.COM Dapur Mandiri Mahardika ditargetkan mampu menyediakan menu bergizi untuk 3.500 siswa dari sekolah penerima manfaat program MBG. Selain itu, keberadaan dapur ini juga diharapkan mampu mendorong perekonomian lokal, terutama bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut tentunya menjadi keunikan sendiri yang dimana aturan baru BGN setiap dapur dibatasi maksimal 3.000 porsi untuk anak-anak dan B3.

Sejumlah penelitian terdahulu tentang dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Suardi & Purmadani (2025) menyoroti dampak program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro tetapi kurang mendalami dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada

aspek keadilan sosial dan politik (Kiftiyah *et al.*, 2025) serta isu akuntabilitas dan keamanan pangan (Pratiwi, 2025). Studi-studi tersebut menyoroti bagaimana program MBG menjadi bentuk implementasi sila kelima Pancasila serta tantangan serius dalam tata kelola, seperti kasus keracunan massal yang mengancam keberlanjutan program (Pratiwi, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Stéphane Verguet 2020 mengenai program makan bergizi di sekolah dilakukan pada 14 negara berkembang yang telah menerapkan kebijakan ini secara nasional, antara lain Brasil, India, Ghana, Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, Meksiko, Chile, dan Botswana. Dalam penelitiannya, Verguet menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak hanya menggunakan program makan sekolah sebagai sarana pemenuhan gizi anak, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi dan sosial. Program ini terbukti meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kehadiran siswa, mengurangi angka anemia dan infeksi pada anak, serta menghasilkan tenaga kerja masa depan yang lebih produktif.

Negara-negara seperti Brasil dan India berhasil mengintegrasikan program ini dengan sektor pertanian lokal, sehingga menciptakan permintaan tetap bagi produk petani kecil dan UMKM pangan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa program makan sekolah dapat memberikan manfaat ekonomi lintas sektor dengan rasio manfaat terhadap biaya mencapai 7 hingga 35 kali lipat dari investasi yang dikeluarkan. Dengan demikian, praktik di negara-negara yang diteliti oleh Verguet menjadi contoh konkret bahwa kebijakan makan bergizi gratis dapat diadaptasi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional (Verde, 2020).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan penting dalam perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, pengolahan sesuai standar gizi, hingga distribusi makanan ke sekolah. Selain menjaga kualitas makanan, SPPG juga berpotensi mendorong ekonomi lokal melalui kerja sama dengan petani dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan (Oktarina & Setiawan, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan (Indef, 2024) bahwa desentralisasi rantai pasok pangan lokal dapat menekan biaya distribusi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi daerah. Dengan demikian, SPPG berfungsi ganda sebagai penyedia layanan gizi dan penggerak ekonomi lokal (Oktarina & Setiawan, 2025).

Maka diharapkan penelitian ini memiliki unsur kebaruan mengenai program makan bergizi gratis yang dilihat dari sisi ekonominya. Penelitian sebelumnya tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak berfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan pangan, dan kebijakan program, sehingga belum mengkaji secara mendalam peran Dapur SPPG sebagai penyerapan tenaga kerja. Peran dapur SPPG sangat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja serta membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Peneliti merasa bahwa penting untuk melakukan penelitian karena belum ada kajian yang meneliti peran Dapur SPPG dalam menyerap tenaga kerja dan, khususnya di Kecamatan Mojowarno. Padahal, program MBG membawa potensi besar dalam mengurangi pengangguran dan mendorong ekonomi lokal. Selain itu, belum terdapat data empiris mengenai mekanisme perekrutan, pembagian kerja, dan tantangan pengelolaan tenaga kerja di Dapur SPPG, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan efektivitas Dapur SPPG dalam menyerap tenaga kerja lokal di Kecamatan Mojowarno?
2. Bagaimana peran keberadaan Dapur SPPG dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan efektivitas Dapur SPPG dalam menyerap tenaga kerja lokal di Kecamatan Mojowarno.
2. Untuk mengetahui peran keberadaan Dapur SPPG terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam perspektif ekonomi pembangunan, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman empiris bagi penulis dalam melakukan penelitian lapangan dan analisis kualitatif di sektor ekonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi dari program pemerintah di tingkat lokal, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan akademisi lain yang ingin meneliti isu serupa.